

Pengembangan Sistem Pengendalian Internal Atas Pengendalian (Studi Kasus PT Sinarmas *Multifinance* Bandung)

*The Development of Internal Control System on Account Receivable Control
(A Case Study at PT Sinarmas Multifinance Bandung)*

Robby Pangestu

Program Studi D4 Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: robbypangestu.akun416@polban.ac.id

Sugih Sutrisno Putra

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: sugih.sutrisno@polban.ac.id

Abstract: Sales is one of the important aspects for a company to make a profit. Credit sales doesn't allow company to receive cash as a directly, but can caused account receivables from customer. Lack of receivable control directly will harm the company. Therefore, an internal control system is needed in order to reduce the possibility of bad debt. As with Sinarmas Multifinance Bandung, there are still bad debts by its customers. Therefore it is necessary to do an evaluation to assess how effective and efficient the existing internal control system is. Researcher in this study will conduct an evaluation and analysis also provide recommendations for the internal control system at Sinarmas Multifinance Bandung with descriptive qualitative method with case study approach and documentation, observation, and interviews conducted in data collection. Internal control system recommendations that will be made by the author will be in the form of Standard Operational Procedure (SOP). Based on the research that the existing of Internal Control System is sufficient. However, there are still some things that must be maximized, so that the authors give recommendations of Internal Control System to maximize existing of Internal Control System.

Keywords: Internal Control System, Account Receivable, Evaluation.

1. Pendahuluan

Dalam usaha mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah mengarahkan khususnya pada bidang ekonomi, dimana pemerintah memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap pertumbuhan ekonomi. Diantara berbagai kebijakan ekonomi yang dilaksanakan, lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank merupakan entitas yang dapat menjadi alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lembaga keuangan bukan bank mendapat perhatian dari pemerintah karena lembaga keuangan bukan bank merupakan salah satu sumber permodalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia saat ini salah satunya adalah perusahaan *leasing* atau *multifinance*. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991, *leasing* merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pembiayaan ini sangat diperlukan masyarakat antara lain untuk

meningkatkan daya guna suatu barang atau jasa, pembelian bahan baku dan barang modal.

Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan piutang kepada konsumen atau disebut piutang usaha, dan barulah kemudian pada hari jatuh temponya, terjadi aliran kas masuk yang berasal dari pengumpulan piutang tersebut. Maka dari itu sistem pengendalian piutang harus dikelola dengan pengendalian internal yang baik agar berjalan efektif dan efisien. Seperti penelitian yang diungkapkan oleh Nabila Habibie (2013) di PT Adira Finance Cabang Manado masih perlu berupaya untuk mengurangi risiko kredit, yang akan berpengaruh terhadap piutang usaha perusahaan seperti penentuan risiko dengan tidak adanya asuransi bagi fungsi yang melaksanakan penagihan dan aktivitas pengendalian internal terhadap piutang usaha juga kurang efektif. Begitu juga dengan yang dikemukakan oleh Hairun Nisa (2017) yang menyatakan sistem pengendalian internal persetujuan dalam memperkecil risiko piutang tak tertagih pada PT Nusa Surya Ciptadana cabang Martapura masih belum sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Perusahaan juga seharusnya memisahkan fungsi penugasan dengan fungsi wewenang dan fungsi otorisasi. Sebaiknya sebelum menyetujui pengajuan kredit nasabah survei harus memperoleh otorisasi oleh fungsi kredit dari Kepala Cabang dan kepala surveyor.

Seperti yang terjadi pada PT Sinarmas Multifinance Bandung, yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa usaha pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak PT Sinarmas Multifinance Bandung, pemberian kredit investasi ini mengandung resiko tertentu. Salah satu yang menonjol dalam pemberian kredit investasi ini adalah perusahaan leasing hanya akan memberikan kredit kepada nasabahnya apabila manajemen merasa yakin bahwa nasabahnya dapat mengembalikan kredit investasi tersebut. Pada dasarnya ada ketidakpastian dapat diterima kembali tepat pada waktunya sehingga menimbulkan tidak tertagihnya kredit tersebut, dimana pada akhirnya akan menimbulkan kredit macet. Akan tetapi, risiko kredit macet selalu terjadi walaupun perusahaan telah menerapkan kebijakan pengendalian tersebut dalam pemberian kredit. Sehingga diperlukan pengembangan atas kebijakan yang ada di PT Sinar Mas Multifinance Bandung. Penulis juga mendapatkan data mengenai piutang yang telah memasuki tahap *overdue* (OD) atau bisa juga disebut dengan kredit macet pada Sinarmas Multifinance Bandung pada bulan September hingga November tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel I.1 Data Piutang Tak Tertagih Sinarmas Multifinance Bandung Periode September – November Tahun 2019

Bulan	Mobil		Motor	
September	OD	253	OD	2039
	OS	2726	OS	18190
	%	9,28%	%	11,20%
Oktober	OD	189	OD	1857
	OS	2661	OS	18042
	%	7,10%	%	10,29%
November	OD	181	OD	2005
	OS	2628	OS	17983
	%	6,88%	%	11,14%

Keterangan : OD = Overdue (Tagihan yang tidak dibayar melewati batas tanggal jatuh tempo yang telah disepakati)

OS = Outstanding (Saldo pokok pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian kredit)

Dari fenomena di atas dapat dikatakan bahwa terjadinya kredit macet bisa disebabkan karena adanya risiko dan kurangnya pengendalian internal pada sistem pengendalian kredit yang

mengakibatkan adanya piutang yang tidak tertagih. Pengendalian piutang harus dikelola dengan sebaik mungkin untuk menghindari hal tersebut karena bisa mengganggu proses bisnis perusahaan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengendalian piutang di PT Sinarmas *Multifinance* Bandung itu kurang efektif sehingga diperlukan adanya evaluasi pada pengendalian internal piutangnya tersebut.

Untuk menghindari maupun untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi, maka perlu adanya pengendalian yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan. Pengendalian internal sangatlah diperlukan seiring dengan tumbuh dan berkembangnya suatu perusahaan. Pengendalian internal juga sangat berpengaruh terhadap hukum yang telah ditetapkan perusahaan sehingga seluruh karyawan dapat menaati kebijakan serta hukum yang berlaku di perusahaan. Pengendalian internal dapat ditangani oleh beberapa metode, salah satunya adalah sistem pengendalian internal menurut COSO, yang mana kerangka konseptual pengendalian internalnya telah menjadi standar di seluruh dunia untuk membangun sebuah pengendalian internal. Tujuan utama dari COSO adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pengendalian internal yang efektif, dan *corporate governance*.

Dengan demikian, diperlukan suatu fungsi penilaian yang independen dalam perusahaan yang bersangkutan untuk menilai dan mengevaluasi aktivitas pemberian kredit agar pengendalian internal tersebut dapat memadai. Fungsi yang melakukan penilaian independen atas jalannya pengendalian internal ini dilakukan oleh audit internal.

2. Kajian Pustaka

2.1. Sistem Pengendalian Internal

Menurut *The Comitee of Sponsoring Organizations of The Treadway Comission* (COSO) dalam *Executive Summary* (2013:3) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yaitu suatu cara yang berisi seperangkat kebijakan dan peraturan untuk mengarahkan, mengawasi, dan melindungi sumber daya perusahaan agar terhindar dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan dan tercapainya tujuan operasi, pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan.

2.2. Control Matrix

Menurut Gelinias, dkk (2014) matriks pengendalian (*control matrix*) adalah suatu alat untuk menganalisis keberadaan (kuat-lemahnya) pengendalian pada suatu sistem atau prosedur yang digambarkan dalam dokumen arus sistem (system flowchart) dan uraian naratifnya. *Control matrix* ini digambarkan dalam bentuk tabel yang mempertemukan baris dan kolom dimana baris diisi oleh rencana pengendalian yang disarankan dan kolom diisi oleh tujuan pengendalian yang harus dicapai.

2.3. Piutang

Pengertian piutang menurut Mulyadi (2011:87) adalah hak perusahaan untuk menuntut pembayarannya atas penjualan barang atau jasa kepada pihak lain, yaitu konsumen atau pelanggan baik perorangan maupun kelompok (badan usaha) dalam bentuk uang, jasa maupun barang yang semuanya akan membawa pengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan dan hubungan langsung dengan langganan penerimaan kredit yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun atau dalam siklus normal perusahaan.

2.4. Leasing

Leasing merupakan kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh penyewa untuk jangka waktu tertentu (Keputusan Menteri Keuangan No. 1169 Tahun 1991). Dalam pembayarannya dapat disesuaikan dari kedua belah pihak baik *lessor* maupun *lessee* mengenai periode pembayaran, jumlah bunga, denda, dan lain sebagainya.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan evaluasi dan analisis pada sistem pengendalian internal atas piutang perusahaan untuk memahami permasalahan yang terjadi di lapangan serta melakukan tindak langsung ke lapangan dan membuat rekomendasi tambahan ataupun perbaikan sistem pengendalian internal yang ada setelah dilakukannya evaluasi dan analisis.

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif yang merupakan penjabaran dari data yang terperinci, dan rincian yang terdokumentasi dan dikutip langsung pada kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer didapatkan dari penelitian dengan cara wawancara langsung pihak yang berkaitan dengan prosedur piutang di perusahaan dan data sekunder didapatkan oleh peneliti melalui dokumen yang sudah ada di perusahaan.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan sumber data dengan dokumentasi, wawancara, dan observasi, serta memberikan kuesioner pertanyaan dimana pertanyaannya sesuai dengan kerangka kerja COSO. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan prosedur pencatatan piutang di perusahaan antara lain *Operational Head*, *Head Support*, *Kepala Back Office*, *Bagian Accounting*, dan *Bagian Account Receivable*. Untuk penyebaran kuesioner, terdapat tujuh responden yaitu, *Operational Head*, *Head Support*, *Kepala Back Office*, dua orang *Accounting*, dan dua orang *Account Receivable*.

3.3. Teknik Analisis Data

3.3.1. Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta penyebaran kuesioner. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara terstruktur yang mana pertanyaannya sesuai dengan kerangka COSO. Begitupun pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Semua pernyataan sesuai dengan kerangka kerja COSO dengan jawaban yang sudah ditentukan. Dokumentasi dilakukan peneliti dengan menganalisis dokumen yang didapatkan berdasarkan dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti, dan observasi dilakukan dengan melihat langsung kegiatan pencatatan piutang di lapangan.

3.3.2. Reduksi Data

Setelah mendapatkan data, peneliti membuat bagan dengan mengategorikan sesuai kerangka COSO. Selanjutnya peneliti menghitung rata-rata skor yang didapatkan di setiap komponen sistem pengendalian internal yang didapatkan. Skala skor rata-rata yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jawaban “Sangat Tidak Setuju” skala $0 < x \leq 1$
2. Jawaban “Tidak Setuju” skala $1 < x \leq 2$
3. Jawaban “Kurang Setuju” skala $2 < x \leq 3$
4. Jawaban “Setuju” skala $3 < x \leq 4$
5. Jawaban “Sangat Setuju” skala $4 < x \leq 5$

Selain dengan penilaian data, peneliti juga mengevaluasi pengendalian internal menggunakan tabel *control matrix* untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih *detail* dan dalam mengenai efektivitas sistem pengendalian internal piutang di perusahaan, sehingga dapat diketahui di poin mana saja yang harus diberikan rekomendasi untuk perbaikan pengendalian internal piutang perusahaan.

3.3.3. Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif setelah selesai dianalisis dan bagan untuk memudahkan dalam pemahaman mengenai di bagian mana yang harus diberikan rekomendasi serta memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal atas pengendalian piutang pada Sinarmas Multifinance Bandung?

Pada saat ini sistem pengendalian internal yang ada pada PT Sinarmas Multifinance Bandung sudah diterapkan, seperti adanya pemisahan fungsi pada setiap entitasnya, meminta persetujuan atas laporan yang akan *diinput* ke sistem perusahaan, serta pengendalian lain yang diperlukan oleh perusahaan. Pada prosedur tersebut, para pegawai memiliki *job description* dan *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Tidak lupa bahwa dalam hampir seluruh kegiatan operasional perusahaan secara keseluruhan, para pegawai sudah dibantu dengan adanya aplikasi yang bernama Mufins yang mana sistem Mufins ini di tiap kantor cabang PT Sinarmas Multifinance akan terintegrasi dengan sistem perusahaan pusat.

Di setiap harinya, bagian *Account Receivable* selalu memulai kegiatan dengan memeriksa data nasabah yang harus membayar lalu akan *dicross check* di akhir jam kerja dengan data nasabah yang membayar di hari itu. Dengan adanya pemeriksaan tersebut, didapatkan data nasabah yang tidak membayar dan data tersebut segera diberikan kepada tim *Collector* untuk segera ditindaklanjuti. Bagian *Account Receivable* tidak selalu *menginput* nominal pembayaran angsuran nasabah secara manual melalui aplikasi Mufins. Tetapi, bagian *Account Receivable* hanya melakukan proses *input* manual jika ditemukan adanya pembayaran yang tidak sesuai dengan kontrak. Jadi jika nasabah membayar angsuran sesuai dengan kontraknya, maka itu akan otomatis *terinput* ke dalam sistem. Bagian *Account Receivable* juga setiap harinya membuat rekapan penerimaan piutang dari nasabah yang nantinya akan digunakan oleh bagian *Accounting* untuk membuat laporan keuangan harian. Proses otorisasi selalu lekat dalam setiap prosedur pencatatan piutang di PT Sinarmas *Multifinance* Bandung, karena dengan dilakukannya hal tersebut maka seluruh informasi yang dihasilkan akan terjamin validitasnya, keakurasiannya, dan kelengkapannya. Dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan dan dokumen yang digunakan saat ini sudah memadai dalam melaksanakan kegiatan pencatatan piutang.

4.2. Bagaimana tingkat efektivitas sistem pengendalian intern atas pengendalian piutang pada Sinarmas Multifinance Bandung?

Penulis memberikan kuesioner kepada para pegawai yang berkaitan dengan prosedur piutang untuk mengetahui seberapa efektif sistem pengendalian internal yang ada saat ini. Kuesioner tersebut penulis rancang berdasarkan kerangka penilaian sistem pengendalian internal internal *Committe of Sponsoring Organization of Treadway Commision* (COSO). Berikut ini pemaparan dari setiap elemen yang didapatkan oleh penulis:

a. Lingkungan Pengendalian

Dari 5 (lima) elemen yang ada pada komponen lingkungan pengendalian, mendapat hasil skor rata-rata “sangat baik”, kecuali pada elemen pertama komitmen terhadap integritas dan data. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Back Office yang dilakukan penulis setelah memberikan kuesioner ini, masih terdapat adanya pegawai yang kurang memahami prosedur dan kebijakan perusahaan dalam melakukan kegiatannya. Itulah sebabnya mengapa selalu diadakan pelatihan-pelatihan terhadap pegawai supaya dapat memahami prosedur dan kebijakan perusahaan dengan baik dan terhindar dari kesalahan dalam berkegiatan.

b. Penilaian Risiko

Pada komponen penilaian risiko, dapat dilihat bahwa setiap elemen yang ada mendapatkan skor rata-rata nilai “baik”. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa hampir semua pegawai selalu mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi dengan pekerjaannya dan merasa perlu mengetahui cara mengatasi risiko tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Back Office bahwa terkadang ada keluhan dari pegawai mengenai adanya gangguan di aplikasi Mufins. Akan tetapi keluhan tersebut tidak bertahan lama karena para pegawai sudah mendapatkan pelatihan dalam penggunaan aplikasi Mufins sehingga dapat mengatasi gangguan yang ada di aplikasi tersebut. Penulis dapat menyimpulkan bahwa pada komponen penilaian risiko pencatatan piutang ini sudah efektif karena pegawai dapat memperkirakan risiko yang mungkin terjadi dan dapat menangani risiko tersebut serta selalu mendiskusikan cara menanganinya tersebut.

c. Aktivitas Pengendalian

Pada komponen aktivitas pengendalian ini, semua elemen mendapatkan skor rata-rata “baik”. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada komponen aktivitas pengendalian sudah efektif. Para pegawai ataupun atasannya memperkirakan dan memberikan saran mengenai pengendalian yang bisa dilakukan dalam menangani risiko yang kemungkinan muncul serta pegawai melakukan fungsi pekerjaannya sesuai dengan job description yang telah ditentukan oleh perusahaan.

d. Informasi dan Komunikasi

Pada komponen informasi dan komunikasi, didapatkan hasil skor rata-rata yang maksimal yaitu “sangat baik”. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa pengendalian internal komponen informasi dan komunikasi sudah efektif. Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa dalam kegiatan awal prosedur piutang ini, adanya kekurangan dalam mendapatkan informasi yang valid, yaitu bukti pembayaran dari nasabah. Pihak Account Receivable hanya mengandalkan informasi yang ada di sistem mengenai pembayaran dari nasabah tanpa mengetahui kebenarannya.

e. Elemen Pengawasan

Pada komponen pengawasan, didapatkan skor rata-rata dengan nilai “sangat baik”. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada komponen pengawasan di prosedur piutang sudah efektif. Hal tersebut juga dapat dikonfirmasi dari hasil wawancara penulis dengan *Operational Head*, di setiap tahunnya perusahaan cabang dapat dievaluasi oleh dua pihak yaitu perusahaan pusat dan juga oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dari perusahaan pusat dapat melakukan kegiatan evaluasi sekali dalam satu tahun bisa juga satu semester sekali. Dan untuk penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan, dilakukan setiap tahun sekali di antara bulan Maret sampai April.

Dari hasil wawancara, *scoring* kuesioner dan penggunaan *control matrix*, serta observasi yang penulis lakukan berdasarkan kerangka penilaian sistem pengendalian internal *Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission* (COSO) yang terdiri dari Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pengawasan beserta elemennya, didapatkan ada 3 (tiga) hal yang menjadi perhatian karena mendapat skor “cukup” atau istilah dalam *control matrix* yaitu missing.

Pertama yaitu pemahaman terhadap prosedur perusahaan yang tidak merata di antara para pegawai. Dengan adanya hal ini maka terdapat risiko yang sangat mungkin terjadi yaitu kesalahan input data yang dilakukan oleh pegawai itu sendiri. Pihak perusahaan sebenarnya memang sudah mengantisipasi masalah ini dengan melakukan kegiatan pelatihan secara berkala dan bergilir kepada pegawainya supaya dapat lebih memahami prosedur dan kebijakan perusahaan.

Selanjutnya walaupun penggunaan username dan password sudah diterapkan ketika hendak mengoperasikan aplikasi Mufins, mungkin saja terjadi penyalahgunaan wewenang jika seorang pegawai di bagian lain mengakses sistem Mufins menggunakan username dan password rekan

kerjanya di bagian Accounting, lalu karena tidak adanya pengamanan ketika hendak mengakses data nasabah secara detail ditakutkan pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki wewenang, dapat mengubah informasi yang ada di dalam sistem Mufins.

Hal selanjutnya yang menjadi perhatian penulis yaitu tidak adanya pengecekan ulang bukti pembayaran dari nasabah oleh bagian Account Receivable. Terdapat risiko jika hal ini tetap dilakukan yaitu adanya kesalahan input oleh pihak Bank. Ketika nasabah melakukan pembayaran angsuran kreditnya, pihak Bank akan menginput saldo pembayaran dari nasabah tersebut. Jika nasabah tidak membayar sesuai dengan kontrak, maka bagian Account Receivable harus mencatat secara manual saldo yang dibayarkan oleh nasabah ke dalam sistem. Untuk mengetahui adanya kesalahan pembayaran tersebut, bagian Account Receivable hanya mengandalkan notifikasi dari aplikasi Mufins dan langsung meminta otorisasi kepada Accounting Pusat tanpa adanya pengecekan ulang antara uang yang dibayar oleh nasabah dengan jumlah uang yang diinput oleh pihak Bank.

4.3. Rekomendasi Sistem Pengendalian Internal

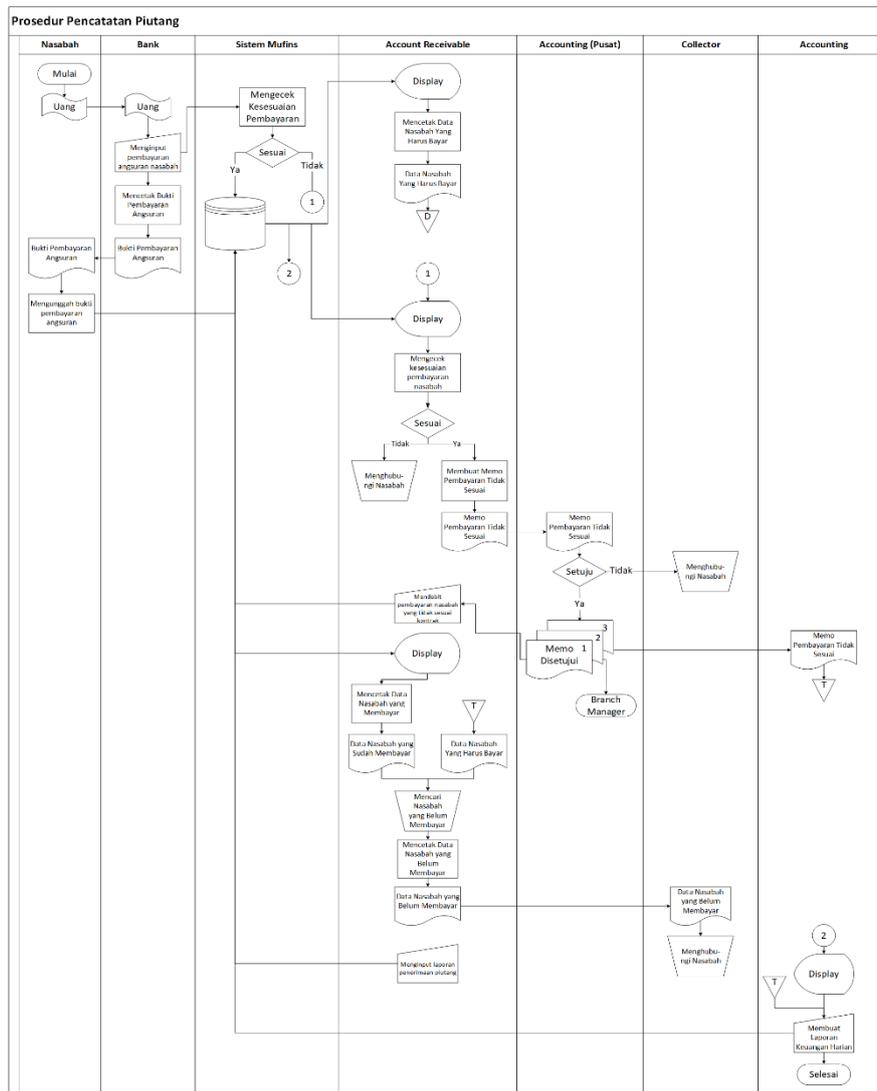
Dari hasil wawancara, *scoring* kuesioner dan penggunaan *control matrix*, serta observasi yang penulis lakukan berdasarkan kerangka penilaian sistem pengendalian internal COSO yang terdiri dari Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pengawasan beserta elemennya, didapatkan ada 3 (tiga) hal yang menjadi perhatian karena mendapat skor “cukup” atau istilah dalam *control matrix* yaitu *missing*.

Pertama yaitu pemahaman terhadap prosedur perusahaan yang tidak merata di antara para pegawai. Dengan adanya hal ini maka terdapat risiko yang sangat mungkin terjadi yaitu kesalahan *input* data yang dilakukan oleh pegawai itu sendiri. Pihak perusahaan sebenarnya memang sudah mengantisipasi masalah ini dengan melakukan kegiatan pelatihan secara berkala dan bergilir kepada pegawainya supaya dapat lebih memahami prosedur dan kebijakan perusahaan. Dengan tidak ditemukannya bagan alur atau *flowchart* juga menjadi membuat pegawai menjadi sedikit membutuhkan waktu lebih untuk memahami prosedur perusahaan.

Selanjutnya yaitu keamanan informasi di dalam sistem yang mungkin saja bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki akses karena tidak adanya pengamanan khusus dalam mengakses *file* data nasabah di dalam sistem. Walaupun penggunaan *username* dan *password* sudah diterapkan ketika hendak mengoperasikan aplikasi Mufins, mungkin saja terjadi penyalahgunaan wewenang jika seorang pegawai di bagian lain mengakses sistem Mufins menggunakan *username* dan *password* rekan kerjanya di bagian *Accounting*, lalu karena tidak adanya pengamanan ketika hendak mengakses data nasabah secara detail ditakutkan pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki wewenang, dapat mengubah informasi yang ada di dalam sistem Mufins.

Hal selanjutnya yang menjadi perhatian penulis yaitu tidak adanya pengecekan ulang bukti pembayaran dari nasabah oleh bagian *Account Receivable*. Terdapat risiko jika hal ini tetap dilakukan yaitu adanya kesalahan *input* oleh pihak Bank. Ketika nasabah melakukan pembayaran angsuran kreditnya, pihak Bank akan menginput saldo pembayaran dari nasabah tersebut. Jika nasabah tidak membayar sesuai dengan kontrak, maka bagian *Account Receivable* harus mencatat secara manual saldo yang dibayarkan oleh nasabah ke dalam sistem. Untuk mengetahui adanya kesalahan pembayaran tersebut, bagian *Account Receivable* hanya mengandalkan notifikasi dari aplikasi Mufins dan langsung meminta otorisasi kepada *Accounting* Pusat tanpa adanya pengecekan ulang antara uang yang dibayar oleh nasabah dengan jumlah uang yang diinput oleh pihak Bank.

Maka dari itu, penulis dapat memberikan rekomendasi pengendalian internal atas piutang pada PT Sinarmas *Multifinance* Bandung seperti yang telah di jelaskan di atas. Berikut adalah tabel aktivitas dan entitas serta bagan alirnya:



Gambar 1. Rekomendasi Prosedur Piutang

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian internal atas pengendalian piutang di PT Sinarmas Multifinance sudah diterapkan khususnya di bagian yang berkaitan dengan prosedur pencatatan piutang.
2. Sistem pengendalian internal atas pengendalian piutang sudah dikategorikan efektif berdasarkan hasil kuesioner yang penulis berikan kepada pegawai PT Sinarmas Multifinance Bandung dengan rata-rata skor “sangat baik”.

5.2. Saran

5.2.1. Saran Praktis

1. Perusahaan pusat dapat menempatkan sebuah tim monitoring yang bertujuan untuk dapat mengawasi pegawai kantor cabang secara khusus. Dengan adanya tim monitoring ini diharapkan para pegawai kantor cabang menjadi lebih taat serta paham mengenai prosedur dan kebijakan perusahaan serta informasi yang ada dalam sistem Mufins

menjadi lebih terjamin.

2. Penggunaan password untuk data nasabah di dalam sistem Mufins. Diharapkan dengan digunakannya pengendalian ini, data-data dalam sistem menjadi lebih terjamin keamanannya.
3. Menambahkan fitur “Unggah Bukti Pembayaran Angsuran” di dalam aplikasi khusus nasabah, Simasku. Dengan adanya fitur ini, bagian Account Receivable dapat memeriksa kesesuaian data pembayaran dari nasabah dan dari Bank supaya data yang diinput benar dan lengkap.

5.2.2. Saran Akademis

1. Pada penelitian selanjutnya supaya peneliti lain dapat menggunakan metode yang berbeda sebagai metode pendukung keputusan untuk selanjutnya dijadikan bahan perbandingan maupun evaluasi bersama.
2. Penelitian yang akan datang sebaiknya memperbanyak variabel-variabel yang dapat disertakan agar hasil penelitian berikutnya dapat dilihat dan dinilai dari sudut pandang yang lebih luas.
3. Untuk pembaca agar dapat lebih menggali lagi mengenai penyebab timbulnya piutang tidak tertagih dengan cara menambah referensi buku yang membahas mengenai pengendalian piutang karena dengan bertambahnya wawasan tentang pengendalian piutang ini, diharapkan para pembaca dapat mengetahui jika ada perusahaan leasing yang melakukan kewajiban penagihan piutang jika tidak sesuai dengan peraturan.

Daftar Pustaka

Sumber Buku :

- Arens, Elder, & Beasley. (2014). *Auditing & Jasa Assurance Diterjemahkan Oleh Herman Wibowo dan Tim Perti* (15 ed.). Penerbit Erlangga.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gelinas, Dull, & Wheeler. (2014). *Accounting Information Systems*.
- Hadi, S. (2011). *Metode Riset Evaluasi*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Hery. (2013). *Auditing I*. Jakarta: CAPS.
- Horngren, C. T., & Harrison, W. T. (2007). *Akuntansi Edisi 7 (Diterjemahkan Oleh: Gina Gandia dan Danti Pujjati)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Husni, H. (2010). *Evaluasi Pengendalian Sistem Informasi Penjualan*. Jakarta.
- Indriyo, Gitosudarmo, & Basri. (2002). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Jogiyanto. (2005). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kasmir. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kemdikbud. (2019). *KBBI Daring*. Retrieved 12 4, 2019, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Miles, M. B. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Mulyadi. (2002). *Auditing, Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2011). *Auditing Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Obom. (2019). *Cara buat kopi*. Singa: Citra.
- Poerwadarminta, W. J. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sekaran, & Bougie. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Bandung: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Fess, P. (2005). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wilson, J. D., & Campbell, J. B. (2002). *Controllershhip Edisi Empat (Diterjemahkan oleh Tjintjin Fenix Tjendera)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wirawan. (2012). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.

Sumber Jurnal :

- Habibie, N. (2013). Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT Adira Finance Cabang Manado.
- Natalia Nur Afifah, d. (2015). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Piutang Pada PT GIS.
- Nisa, H. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Intern Persetujuan Kredit Dalam Memperkecil Resiko Piutang Tak Tertagih Pada PT Nusa Surya Ciptadana Cabang Martapura.
- Tarore, J. d. (2016). *Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Piutang Pada PT Mandiri Tunas Finance Cabang Manado*.

Sumber Peraturan :

- Menteri Keuangan. 1991. Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tentang Pengertian Leasing
- Menteri Keuangan, dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. 1974. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, No. Keputusan 122/KMK/N/2/1974, No. Keputusan 32/M/SK/2/1974, No.30/KPB/1974 tentang Perjanjian Usaha Leasing.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 1994. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 9 tentang Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek